



## FILOSOFI KEKUASAN DAN POLITIK DALAM ORGANISASI

Abdul Wahid Mahsuni, Navilah Laila Wardani, Moch Ardiansyah Pramudya,

Maharani Ulya Fadhilah, Ahmad Fajar Irianto

Universitas Islam Malang

[abdulwahid\\_fe@unisma.ac.id](mailto:abdulwahid_fe@unisma.ac.id), [navilahwardani@gmail.com](mailto:navilahwardani@gmail.com),

[ardianayahpram782@gmail.com](mailto:ardianayahpram782@gmail.com), [maharaniulya54@gmail.com](mailto:maharaniulya54@gmail.com),

[ahmadfjr16@gmail.com](mailto:ahmadfjr16@gmail.com)

### **Abstract**

*Power is used as the basis of politics, where individuals or groups try to use it to achieve personal or group goals. The purpose of this study is to investigate the role of power and politics in an organizational context, as well as to understand how the distribution of power, the use of politics, and the dynamics of power and politics can affect organizational performance. The research method in this article uses library research, which is a study that studies various reference books as well as the results of previous similar research that is useful for obtaining a theoretical basis for the problem to be studied. power and politics play an important role in organizations. Power can appear in various forms, such as formal power related to hierarchical positions and informal power related to interpersonal influence. Organizational politics involves the efforts of individuals or groups to utilize their power to achieve personal or group goals.*

**Keyword** : Power, Politics, Organization

### **Abstrak**

Kekuasaan digunakan sebagai dasar politik, dimana individu atau kelompok berusaha menggunakannya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran kekuasaan dan politik dalam konteks organisasi, serta untuk memahami bagaimana distribusi kekuasaan, penggunaan politik, dan dinamika kekuasaan dan politik dapat memengaruhi kinerja organisasi. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. kekuasaan dan politik memainkan peran penting dalam organisasi. Kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekuasaan formal yang terkait dengan posisi

---

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Januari 2, 2024

\*Corresponding author, e-mail address

## FILOSOFI KEKUASAAN DAN POLITIK DALAM ORGANISASI

hierarki dan kekuasaan informal yang berkaitan dengan pengaruh interpersonal. Politik organisasi melibatkan upaya individu atau kelompok untuk memanfaatkan kekuasaan mereka guna mencapai tujuan pribadi atau kelompok.

**Kata Kunci :** Kekuasaan, Politik, Organisasi

### PENDAHULUAN

Kekuasaan adalah sesuatu yang dapat diperoleh individu atau kelompok untuk menjalankan keahliannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Kewenangan tidak dapat dilaksanakan melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan untuk mempengaruhi perilaku individu/kelompok sesuai dengan keinginan pihak yang terlibat.<sup>1</sup> Studi tentang kekuasaan dan pengaruhnya sangat penting untuk dipahami bagaimana organisasi melakukan aktivitasnya. Sangat memungkinkan untuk melibatkan kekuasaan (power) dalam setiap interaksi dan hubungan sosial pada organisasi. Orang cenderung untuk mempengaruhi individu lain dan organisasi dalam setiap tindakan atau perilakunya dengan melakukan social influence dan tindakan.<sup>2</sup>

**Politik** adalah proses persaingan dan negosiasi untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan. Politik dapat terjadi di semua tingkatan organisasi, dari tingkat individu hingga tingkat organisasional. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Namun, dalam decade terakhir ini, konflik dan politik telah menjadi bukan hanya dapat diterima tetapi topik yang modis dalam teori organisasi.

**Filsafat kekuasaan dan politik dalam organisasi** adalah studi tentang bagaimana kekuasaan dan politik digunakan dalam organisasi. Studi ini mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana politik digunakan untuk memengaruhi keputusan, dan bagaimana kekuasaan dan politik dapat berdampak pada kinerja organisasi.

Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan,

---

<sup>1</sup> Budiarjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

<sup>2</sup> Greenberg, J., & Baron, R. A., 2000. *Behavior in Organizations Understanding and Managing the Human Side of Work*, Prentice – Hall International, New Jersey

kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi.<sup>3</sup> Politika adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan.<sup>4</sup>

Kekuasaan digunakan sebagai dasar politik, dimana individu atau kelompok berusaha menggunakannya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Politik dapat terjadi di berbagai tingkat organisasi, dari tingkat operasional hingga tingkat manajemen tertinggi, dan mempengaruhi cara pengambilan dan penerapan keputusan. Memahami dinamika kekuasaan dan politik dapat membantu organisasi mengelola konflik, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan yang lebih efisien serta berdaya saing.

Penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan para politisi dalam dunia politik telah menimbulkan persepsi bahwa tujuan utama berpartisipasi dalam politik hanyalah untuk memperoleh kekuasaan. Padahal, pelaksanaan kekuasaan dalam politik pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur kepentingan masing-masing individu dalam suatu organisasi, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok mana pun.

Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan anggota organisasi terhadap otoritas dan menciptakan keadilan dan kenyamanan dalam hidup. Meskipun kekuasaan melibatkan distribusi otoritas, politik melibatkan strategi dan taktik untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menganalisis interaksi antara anggota organisasi untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, konflik diselesaikan, dan tujuan organisasi dicapai. Dalam konteks organisasi, kekuasaan dan politik sering kali saling berkaitan.

---

<sup>3</sup> Paramita, P. D. (2011). Keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi. *Dinamika Sains*, 9(21).

<sup>4</sup> Khairani, L. (2020). [BUKU] Sejarah Politik dan Kekuasaan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen

### METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>3</sup> Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.<sup>5</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kekuasaan

##### 1. Definisi kekuasaan

Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi, kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk, satu pihak memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksanakannya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka ada pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.<sup>6</sup> kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-

---

<sup>5</sup> Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.

<sup>6</sup> Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan- golongan tertentu.<sup>7</sup>

## 2. Tipe-tipe kekuasaan

Menurut Tosi, Rizzo, dan Carrol (1990), ada lima tipe kekuasaan, yaitu :

### a. Reward Power

Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkrit adalah jika anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan akan meningkat, maka dapat menggunkan reward power. Bahwa seseorang dapat melakukan reward power karena ia mampu memberi kepuasan kepada orang lain.

### b. Coercive Power

Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai 'lisensi' untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan yang poersif ini terlalu banyak digunakan akan membawa kemungkinan bawahan melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukuman yang dirasakannya tidak adil, bahkan sangat mungkin bawahan atau karyawan akan meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

### c. Referent Power

Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan 'kesukaan' atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkrit, seorang pimpinan akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya.

---

<sup>7</sup> Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford Univercity Press, 1946, hal.180, yang diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

## FILOSOFI KEKUASAN DAN POLITIK DALAM ORGANISASI

### d. Expert Power

Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu, kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power.

### e. Legitimate Power

Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya (actual power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur social suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilai cultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut.<sup>8</sup>

## 3. Sumber-Sumber Kekuasaan dalam Organisasi

Kekuasaan berdasarkan kedudukan memiliki potensi dalam organisasi yang terdiri dari :

### a. Kewenangan Formal

Kewenangan formal merupakan kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif dimana kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial.

### b. Kekuasaan Pribadi

Kekuasaan pribadi merupakan kelompok sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan yang berlimpah pada orang yang secara hirarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Pengaruh potensial terdiri dari :

#### 1) Kekuasaan keahlian

---

<sup>8</sup> Tosi, H.L., Rizzo, J.R. & Carrol, S.J., (1990). *Managing Organizational Behavior*. (2nd Edition). New York: Harper Collins Publisher.

Kekuasaan keahlian (expert power) merupakan kekuasaan yang bersumber dari keahlian dalam memecahkan masalah tugas-tugas penting.

2) Kekuasaan kesetiaan

Kekuasaan kesetiaan (referent power) merupakan potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang terkait keterampilan interaksi antar pribadi, seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi dan empati.

3) Kekuasaan karisma

Kekuasaan karisma merupakan sifat bawaan dari seseorang yang mencakup penampilan, karakter dan kepribadian yang mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan.

## **Politik**

### 1. Definisi Politik

Politik berasal dari Bahasa Yunani “politeia” yang berarti kiat memimpin kota (polis). Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Arsitoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.<sup>9</sup> Konsep politik dibagi menjadi :

a. Politik sebagai kepentingan umum

Politik sebagai tempat keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri.

b. Politik dalam arti kebijaksanaan

Penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

---

<sup>9</sup> Aristoteles, *Ethics*, terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd, 1970.

### 2. Pengertian Politik dalam Organisasi

Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu<sup>10</sup>. Kelaziman dan intensitas kemunculan politik organisasi berbeda-beda mengikuti karakteristik struktur organisasi dan siklus khusus.<sup>11</sup>

Ada beberapa aspek situasi yang memunculkan aktivitas politik dalam organisasi, sebagai berikut:

- a. Perilaku politik biasanya muncul pada saat ada ketidakpastian, sumber daya yang langka, unit-unit (individual dan kelompok) memiliki kepentingan yang terkonflik dan saat anggota-anggota organisasi memiliki kekuasaan (power) yang hampir sama.
- b. Perilaku politik yang muncul dalam bidang sumber daya manusia, seperti pada saat penilaian kinerja, seleksi personel, dan keputusan kompensasi. Hal ini kemungkinan karena adanya ambiguity. Lingkungan organisasional bersifat ambiguous karena tidak adanya kriteria evaluasi yang jelas, sehingga organisasi cenderung kurang bergantung pada hasil yang dapat diukur dan lebih pada usaha pekerja, potensi yang dipersepsikan dan karakteristik, nilai, dan sikap personal. Semua hal tersebut dapat diubah melalui manipulasi pertimbangan.<sup>12</sup>
- c. Aktivitas politik biasanya tidak sama pada tahap hidup organisasi yang berbeda. Ada tiga tahapan dalam organisasi yang memiliki perilaku politik yang berbeda-beda. Tahap pertama, saat organisasi baru berdiri, pendiri organisasi memperoleh kekuasaan politik dengan menunjukkan ide mereka kepada para bawahannya. Kedua, tahap pertumbuhan organisasi, anggota organisasi cenderung terpisah-pisah karena kekomplekan tugas sehingga menciptakan adanya kepentingan yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan konflik. Ketiga, saat pertumbuhan organisasi mengalami penurunan, anggota-anggota merasa tidak aman akan

---

<sup>10</sup> Greenberg, J., & Baron, R. A., 2000. *Behavior in Organizations Understanding and Managing the Human Side of Work*, Prentice – Hall International, New Jersey

<sup>11</sup> Drory, A., 1993. Perceived Political Climate and Job Attitudes, *Organization Studies*, 14, p. 59 - 71

<sup>12</sup> Ferris, Gerald & Kacmar, K. Michele, 1992. Perception of Organizational Politics, *Journal of Management*, Vol. 18 No. 1, p. 93 - 116



pekerjaannya dan memerlukan tindakan politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian organisasi.<sup>13</sup>

### 3. Elemen Politik dalam organisasi

Albrecht (1983) mengungkapkan ada lima elemen iklim politis dalam organisasi yang harus dipahami manajer senior dalam mengendalikan organisasi, antara lain:

#### A. Inner Circle Relationship

Mengidentifikasi hubungan antara Manager Upper dengan Chief Executive, perihal hubungan yang bersifat kekeluargaan dan kolaborasi antar manajer.

#### a. Axis of Influence

Mengidentifikasi hubungan pertemanan dari manager menengah / area yang memiliki hubungan langsung ke Chief Executive tanpa melewati Manajer Divisinya.

#### b. Informal Power Centers

Karyawan level operasional yang memiliki hubungan khusus / pertemanan dengan manajer senior, sehingga melewati atasannya.

#### c. Polarizing Elements

Ketidakcocokan antara Manajer dengan bawahannya dalam hal semua aktivitas organisasi atau hanya perbedaan yang tidak prinsip sehingga antar personal saling berkompetisi.

#### d. Informal Coalitions

Grup manajer yang berkoalisi untuk menolak keputusan atau mengambil keputusan yang lain dengan yang sudah ditetapkan manajer atasnya.<sup>14</sup>

### **Keterkaitan antara Politik dan Kekuasaan dalam Organisasi**

kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power), seperti

---

<sup>13</sup> Greenberg, J., & Baron, R. A., 2000. Behavior in Organizations Understanding and Managing the Human Side of Work, Prentice – Hall International, New Jersey

<sup>14</sup> Karl Albrecht. Organizational Development: A Total System Approach to positive Change in Any Business Organization; Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall Inc; 1983.

## FILOSOFI KEKUASAN DAN POLITIK DALAM ORGANISASI

influence (pengaruh), persuasion (persuasi), force (kekuatan), coercion (kekerasan) dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan, tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas. Sehingga, bila seorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan, maka dia telah menyalahgunakan wewengannya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi

Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks perilaku organisasi, kekuasaan dan politik memainkan peran penting. Kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekuasaan formal yang terkait dengan posisi hierarki dan kekuasaan informal yang berkaitan dengan pengaruh interpersonal. Politik organisasi melibatkan upaya individu atau kelompok untuk memanfaatkan kekuasaan mereka guna mencapai tujuan pribadi atau kelompok.

Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik

---

<sup>15</sup> Heryawan, Ahmad. 2009. Kekuasaan Politik. Online. Tersedia : <http://www.ahmadheryawan.com/kolom/3840-kekuasaan-politik.html>

bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Penting untuk organisasi memiliki struktur dan budaya yang mendukung distribusi kekuasaan yang adil dan transparan serta mengurangi praktik politik yang merugikan. Efektivitas organisasi seringkali tergantung pada sejauh mana kekuasaan dan politik dikelola untuk mendukung tujuan bersama dan kesejahteraan seluruh anggota organisasi.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Aristoteles, *Ethics*, terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd, 1970.
- Budiarjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Drory, A., 1993. Perceived Political Climate and Job Attitudes, *Organization Studies*, 14, p. 59 – 71
- Ferris, Gerald & Kacmar, K. Michele, 1992. Perception of Organizational Politics, *Journal of Management*, Vol. 18 No. 1, p. 93 - 116
- Greenberg, J., & Baron, R. A., 2000. *Behavior in Organizations Understanding and Managing the Human Side of Work*, Prentice – Hall International, New Jersey
- Heryawan, Ahmad. 2009. *Kekuasaan Politik*. Online. Tersedia : <http://www.ahmadheryawan.com/kolom/3840-kekuasaan-politik.html>
- Karl Albrecht. *Organizational Development: A Total System Approach to positive Change in Any Business Organization*; Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall Inc; 1983.
- Khairani, L. (2020). [BUKU] *Sejarah Politik dan Kekuasaan*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford University Press, 1946, hal.180, yang diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Paramita, P. D. (2011). Keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi. *Dinamika Sains*, 9(21).
- Tosi, H.L., Rizzo, J.R. & Carrol, S.J., (1990). *Managing Organizational Behavior*. (2nd Edition). New York: Harper Collins Publisher.